



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Hamparan Perak, 08 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dengan alamat Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sei Baharu, 06 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dengan alamat Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Teelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/080/II/2016, tertanggal 22 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama sekitar 2 (dua) Tahun dialamat sebagaimana alamat Tergugat diatas dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Afiza Ghania, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 2017;
3. Bahwa semula hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) Tahun Pernikahan sekitar tahun 2019, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena :
  - Tergugat merupakan seorang yang kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dimana Tergugat menafkahi Penggugat sesuka hati Tergugat tanpa memikirkan cukup tidaknya dan Tergugat terkadang memberikan nafkah dan Terkadang tidak memberikan;
  - Tergugat merupakan seorang yang malas bekerja dan sulit diatur;
  - Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
  - Tergugat telah menjalin kasih dengan wanita idaman selain Penggugat;
  - Tergugat merupakan seorang yang tempramental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat mengalami cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat serta Tergugat ketika marah cenderung memukul dinding rumah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Tanggal 02 September 2022, disebabkan karena Tergugat merupakan seorang yang malas bekerja dan tempramental dimana ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk bekerja, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



dari Tergugat yang tidak kunjung berubah yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dialamat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat saat ini tinggal dirumah orang tua Tergugat dialamat sebagaimana alamat Tergugat diatas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Afiza Ghania, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas para pihak dengan mencocokkan pada kartu identitas Penggugat dan ternyata Penggugat adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/080/II/2016, tertanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, dinazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1** diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **xxxx** Nomor 1207-LT-23082019- 0066 tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazeggellen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 diparaf dan diberi tanggal;

B.-----

## Bukti Saksi:

1. **Nama Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Hamparan Perak, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat suami Penggugat bernama Sabri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022 sampai sekarang, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Afiza Ghania, umur 7 tahun;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut dan Penggugat bukan seorang pengguna narkoba;

- Bahwa Penggugat sanggup merawat dan menghidupi anaknya;

2. Nama **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Sungai Baharu, 01 Februari 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Pahlawan Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan Tergugat suami Penggugat bernama Sabri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 2016;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022 sampai sekarang, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Afiza Ghania, umur 7 tahun;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut dan Penggugat bukan seorang pengguna narkoba;

- Bahwa Penggugat sanggup merawat dan menghidupi anaknya;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban, pembuktian dan kesimpulan dari Tergugat dilewatkan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut Pasal 55 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis dibacakan gugatan Penggugat dan untuk keseluruhan isi gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.2, adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Afiza Ghania, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 2017 yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama **Saksi I dan Saksi II** sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibatnya telah pisah sejak bulan September 2022 sampai sat ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri/ sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dengan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 22 Januari 2016;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 dan pertengkaran terakhir terjadi bulan September 2022;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022 sampai sekarang, Penggugat pergi dari rumah keiaman Bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah ;
4. Bahwa sudah banyak yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung ;

1. Al-quran

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله  
واسعا حكيما**

2. Al Hadis

**ابغض الحلال عند الله الطلاق**

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



3. Kitab Fiqhus Sunnah : II / 248 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang isinya sebagai berikut;

**فاذا ثبتت دعواها لذالقاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز  
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri ( Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 ).

2. Kaidah Fikih

### **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun damai kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afiza Ghania, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut;

Halaman **11** dari **15** halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan buti P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti anak yang bernama Afiza Ghania, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 2017 belum mumayyiz, oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) anak yang belum mumayyiz adalah berada dalam asuhan ibunya karena dianggap lebih dekat hubungan batin dengan ibunya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera *vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak hadhonah patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afiza Ghania, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 2017 ditetapkan Penggugat sebagai hak hadhonah/asuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara kedua anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, melihat atau bertemu dengan anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhonah) tersebut, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 (empat), menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama xxxx, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Nur Al Jumat, S.H., M.H.. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Gusneti, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Hj. Gusneti, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk





Perincian biaya :

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses    | Rp 50.000,00       |
| 2. Biaya Panggilan | Rp .000,00         |
| 3. Biaya PNPB      | Rp 70.000,00       |
| 4. Biaya Meterai   | Rp 10.000,00       |
| 5. Biaya PBT       | <u>Rp . 000,00</u> |

Jumlah Rp .000,00  
( ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)